

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku – Buku :

Abdoel Fattah, 2005, *Demiliterisasi Tentara; Pasang Surut Politik Militer 1945 – 2004*, Yogyakarta: LKiS.

Abdul Latif, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta: Total Media.

Afan Gaffar, 1999, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi Ctk.I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arbi Sanit, 1998, *Reformasi Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ariyanto, 2020, *Memulihkan Hak Pilih TNI dan POLRI di Pemilu (Telaah Konstitusional Hak Asasi Manusia dalam Melindungi Hak Politik Warga Negara)*, Yogyakarta: LeutikaPrio.

Awaloedin Djamin, 2007, *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Dalam Sistem Ketatanegaraan: dulu, kini dan esok*, Jakarta: PTIK Press.

Bambang Sutiyoso, 2004, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Bunyamin Alamsyah, 2010, *Pemilu dalam Tutu Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia, Ctk.1*, Bandung: Baticpress.

Eep Saefulloh Fatah, 1999, *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde baru, Ctk. I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Idy Subandi Ibrahim, 2006, *Bersaksi di Tengah Badai dari Catatan Wiranto Jenderal Purnawirawan, Ctk. III*, Jakarta: Ide Indonesia.

Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, 2019, *Presidential Threshold*, Malang: Setara Press.

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kacung Marijan, 2010, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca – Orde Baru*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta: Gramata Publishing.

Marsono, 1999, *Pemilihan Umum 1997*, Jakarta: Djambatan.

Miriam Budiardjo, 1994, *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Miriam Budiardjo, 1998, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Ctk.kedua*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Moh. Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

Moh. Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu Ed. I*, Jakarta: Rajawali Pers.

M. Afifuddin, 2020, *Membuka Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*, Jakarta: PT.Gramedia.

Muhadam Labodo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad Fajrul Falaakh, 2001, *Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Ni'Matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia Ed. 1-2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya: Laksbang Mediatama.

Ramlan Surbakti, 2007, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Grasindo.

Ramly Hutabarat, 2005, *Politik Hukum Pemerintahan Soeharto Tentang Demokrasi Politik di Indonesia, Ctk. II*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Romi Librayanto, 2008, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Ctk. Pertama*, Makassar: PUKAP

Roni Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rozah Abdullah, 2001, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana.

Samuel E. Finer, 2002, *The Man Horse Back: The Role of The Military in Politics*, New York: Frederick A. Praeger.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2005, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ster TNI dan Pusdenham, 2007, *Sistem Pemilu dan Prosedur Pemilihan Di Indonesia Ctk. II*, Jakarta.

Ster TNI dan Pusdenham, 2007, *Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada, Ctk. II*, Jakarta.

Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm.139

Zainuddin Ali, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

2. Jurnal :

Abu Tamrin, 2013, Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi, *Jurnal Cita Hukum Vol. I No. 2*, Jakarta, hlm. 194

Adrianus Bawamenewi, 2019, Implementasi Hak Politik Warga Negara, *Jurnal Warta Edisi: 61*, Jambi: Universitas Dharmawangsa, hlm. 44

Albert Hasibuan, 2008, Politik Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945, *Jurnal Law Review Vol. 8 No. 1*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, hlm. 43

Alfianim, 2016, Pembatasan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Online Mahasiswa Vol.III No. 2*, Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 7

Andrizal, 2014, Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004, *Jurnal Ilmu Hukum*, Jakarta, hlm. 113

Hasnati, 2003, Pertautan Kekuasaan Politik dan Negara Hukum, *Jurnal Hukum Respublica, Vol. 3 No. 1*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, hlm. 102

Hesti Armiwulan, 2004, Hak Asasi Manusia dan Hukum, *Jurnal Yustika, Vol.7 No.2*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, hlm. 313

Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, 2019, Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestan Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 2, No. 2*, hlm. 163

Jean Daryn Hendar Iskandar, 2018, Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Journal Lex Administratum, Vol. VI No. 4*, hlm. 47

Kevin R. Komalig, 2017, Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014, *Journal Article Lex Crimen Vol. VI No. 4*, hlm. 153

Malik, 2009, Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, *Jurnal Konstitusi Vol. 6, No. 1*, Jakarta, hlm. 82

M. Adian Firnas, 2015, Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi, *Jurnal Review Politik Vol. 6 No. 1*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 171

M. Mahrus Ali, Alia Harumdani Widjaja dan Meyrinda Rahmawaty Hilipito, 2018, Tenggang Waktu Konstitusionalitas dan Kebersesuaian Undang – Undang dengan UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi Vol. 15. No. 4*, Jakarta, hlm. 838

Ni'matul Huda, 2014, Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 21*, Yogyakarta, hlm. 203

Nurhasan, 2005, Pasang Surut Penegakan HAM dan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hlm. 215

Rahmat Maulana Winata, Iwan Rachmad, dan Rosita Indrayati, 2014, Kajian Yuridis Netralitas Hak Pilih Polisi Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ).

Sarah Nuraini Siregar, 2019, Netralitas POLRI Menjelang Pemilu Serentak 2019, *Jurnal Penelitian Politik Vol. 16 No. 1*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik.

Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, 2011, Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri Dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.1*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm. 50

Sumali, 2003, Urgensi TNI di Bingkai Konstitusi Dalam Perspektif Yuridis Politis, *Jurnal Hukum Respublica Vol. 3 No. 1*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, hlm. 61

Syamsiar Julia, 2006, Pelanggaran HAM dan Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Equality Vol. 11 No. 2*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 116

Tanto Lailam, 2014, Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang – Undang Terhadap Undang – Undang Dasar 1945, *Jurnal Media Hukum Vol. 21 No.1*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, hlm. 90

Todung Mulya Lubis, 2009, Menegakkan Hak Asasi Manusia Menggugat Diskriminasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 39 No. 1*, Jakarta Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 61

William Edson Apena, 2017, Kajian Konstitusional Hak Pilih Anggota TNI dan POLRI Dalam Pemilihan Umum, *Journal Lex Crimen Vol. VI No.1*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, hlm. 135

3. Peraturan Perundang – Undangan :

- i. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sementara Tahun 1950.
- iii. Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 Tahun 1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.
- iv. Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Peninjauan Kembali Produk – Produk Legislatif, Negara Diluar Produk MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan Undang – Undang Dasar 1945.
- v. Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Soekarno.

- vi. Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia
- vii. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- viii. Ketetapan MPR RI VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- ix. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sementara Tahun 1950.
- x. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- xi. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang.
- xii. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota – Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat.
- xiii. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- xiv. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1975 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan

Umum Anggota – Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat.

- xv. Undang – Undang Nomor 2 tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota – Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1975.
- xvi. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
- xvii. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota – Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1980.
- xviii. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
- xix. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- xx. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- xxi. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- xxii. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- xxiii. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- xxiv. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak – Hak Sipil dan Politik)
- xxv. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- xxvi. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- xxvii. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- xxviii. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1954 tentang Cara Pencalonan Buat Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat / Konstituante Oleh Anggota Angkatan Perang Dan Pernyataan Non Aktip / Pemberhentian Berdasarkan Penerimaan Keanggotaan / Pencalonan Keanggotaan Tersebut, Pun

Larangan Mengadakan Kampanye Pemilihan Terhadap Anggota Angkatan Perang.

- xxix. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota – Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1985.
- xxx. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota – Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah.
- xxxi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- xxxii. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 27 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

xxxiii. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014
Pengujian Pasal 260 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

4. Internet :

<https://news.detik.com/berita/d-1384840/mahfud-md-atut-teknis-hak-pilih-tni-agar-tak-direkayasa> Diakses pada Rabu, 23 Juni 2010 Pukul 15:21WIB

<https://www.berdikarionline.com/pro-kontra-hak-pilih-tni/>

Diakses pada 24 Juni 2010 Pukul 01:23WIB

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/tni-sejarah-dan-perkembangan-organisasi> Diakses pada Selasa 13 Oktober 2020 Pukul 10:07WIB

<https://manado.tribunnews.com/2020/10/03/sejarah-tentara-nasional-indonesia-dari-bkr-tni-apri-abri-hingga-tni?page=2> Diakses Pada Sabtu, 3 Oktober 2020 Pukul 01:53WIB

https://www.kpu-semarangkab.go.id/?page_id=61 Diakses Pada 22 Desember 2020 Pukul 13:55WIB

<http://www.kpu.go.id>. Diakses Pada 14 Februari 2005, Pukul 15:00WIB

<https://health.kompas.com/read/2010/06/24/04091640/jangan.khawatir.hak.pilih?page=all> Diakses Pada 24 Juni 2010 Pukul 04:09WIB

www.komisipemilihanumum.com Diakses Pada 13 Oktober 2010 Pukul 13:45WIB

www.komisipemilihanumum.com Diakses Pada 13 Januari 2009 Pukul 22:00WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/18/08380061/saat-parlemen-minta-soeharto-mundur?page=all> Diakses Pada 18 Mei 2020 Pukul 08:38WIB

<https://m.suarakarya.id/category/1/POLITIK>

Diakses Pada 30 Desember 2006

<https://news.detik.com/berita/d-708139/mk-bahas-hak-pilih-tni-polri>

Diakses Pada 15 November 2006, Pukul 08:40WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/28/1226045/MK.Anggota.TNI.Polri.Tak.Punya> Diakses Pada 28 Mei 2014 Pukul 12:26WIB

<http://www.rumahpemilu.org/in/read/6049/Wahyudi-Djafar-Belum-Saatnya-TNIPolri-BisaMemilih> Diakses Pada 15 Januari 2016 Pukul 09:00WIB

<http://www.rumahpemilu.org/in/read/6049/Wahyudi-Djafar-Belum-Saatnya-TNIPolri-BisaMemilih> Diakses Pada 15 Januari 2016 Pukul 09:00WIB

<http://archive.kaskus.co.id/thread/4751900/0/hak-pilih-prajurit-tni-hak-konstitusional> Diakses Pada 08 Januari 2016 Pukul 19:18WIB

<http://www.imparsial.org/ja/berita-baru/hak-pilih-tni/> Diakses Pada 08 Januari 2016 Pukul 20:09WIB

<https://nasional.tempo.co/read/258132/permedi-tolak-pemberian-hak-pilih-tnipolri/full&view=ok> Diakses Pada 24 Juni 2010 Pukul 13:38WIB